

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan implementasi penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta dalam upaya rancangan pengembangan transportasi di DKI Jakarta belum berhasil meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna sepeda serta pejalan kaki dan masih tingginya angka pelanggaran terhadap kebijakan tersebut sebagaimana yang dimaksud dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019.

Masih terdapat sebagian lain dari masyarakat Jakarta yang belum sepenuhnya mengalami manfaat positif dari kebijakan implementasi ini. Bahkan, sebagian masyarakat Jakarta tersebut justru menghadapi dampak negatif, seperti kemacetan yang merata di berbagai area Jakarta, mengakibatkan tingginya tingkat polusi udara. Selain itu, aktivitas ekonomi juga terhambat dan muncul biaya tambahan yang tinggi, dampaknya pada akhirnya mengakibatkan penurunan kesejahteraan sosial.

Fakta ini didukung oleh data pertambahan kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 96 insiden pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2021 jumlah kendaraan di Jakarta mencapai sekitar 21,75 juta unit, menunjukkan peningkatan sebesar 7,6% (*year-on-year/yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan keempat indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai.

Keempat indikator tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Dari keempat indikator tersebut dinilai bahwa pada indikator komunikasi, belum terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Perlunya sosialisasi dan edukasi secara merata dari pihak terkait kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Dinilai dari

indikator sumber daya yang perlu diperhatikan adalah jumlah SDM. Kurangnya jumlah SDM mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang kurang efektif.

Dilihat dari indikator disposisi (sikap pelaksana) meskipun Dishub memiliki komitmen yang tinggi pada kebijakan ini, namun sikap pemerintah juga dapat berubah seiring dengan dukungan dari pimpinan, perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Jika dilihat dari indikator struktur birokrasi, hal yang perlu diperhatikan yaitu pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan jalur sepeda. Tanpa pemantauan yang baik, sulit untuk mengetahui apakah kebijakan jalur sepeda berjalan sesuai dengan rencana dan apakah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi yang tidak memadai juga bisa menghambat perbaikan dan penyesuaian kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

## **6.2. Saran**

Agar pelaksanaan penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka ada sejumlah saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Faktor aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta, pemerintah perlu melakukan strategi komunikasi seperti bermitra dengan media massa untuk menyebarkan informasi dan mengadakan forum diskusi terbuka antara pemerintah, komunitas sepeda dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendengarkan masukan masyarakat mengingat perkembangan yang terjadi pada lajur sepeda dan transportasi, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah pencegahan lebih awal dan intensif untuk mengurangi dampak negatif yang timbul akibat implementasi lajur khusus sepeda di DKI Jakarta.
2. Untuk mengatasi faktor aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan sarana dan prasarana terkait

lajur sepeda. Ini mencakup perbaikan dan perluasan jalur sepeda, peningkatan kualitas permukaan jalan, dan pemasangan rambu lalu lintas yang jelas dan informatif di sepanjang lajur sepeda. Penting untuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap lajur sepeda, termasuk perbaikan cepat terhadap kerusakan atau bahaya yang mungkin timbul. Melakukan kampanye kesadaran masyarakat yang fokus pada manfaat penggunaan sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan, sehat, dan ekonomis. Informasi ini dapat membantu mendorong lebih banyak orang untuk memanfaatkan lajur sepeda.

3. Faktor aspek disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta, pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan khusus bagi staf pelaksana untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kebijakan lajur khusus sepeda. Pelatihan ini harus mencakup kesadaran tentang manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah juga perlu menggelar kampanye internal yang mendorong staf pelaksana untuk mengadopsi sikap yang positif dan proaktif dalam mengawasi pelanggaran di lajur sepeda.
4. Faktor aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta, pemerintah harus memastikan penggunaan SOP yang konsisten dalam seluruh tingkatan birokrasi terkait dengan kebijakan lajur sepeda. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi SOP di seluruh tingkatan birokrasi untuk memastikan bahwa prioritas kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar diikuti dan dijalankan dengan baik.